ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH:

NAMA: GINTA MAANARI ADIL

NIM : 22 2003 030

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI 2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ginta Maanari Adil

Nim

: 22 2003 030

Jurusan

: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2008 Penulis,

Ginta Maanari Adil

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL

: ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN **MUSI RAWAS**

Nama

: GINTA MAANARI ADIL

NIM

: 22 2003 030

Jurusan

: Akuntansi

Mata Kuliah Pokok: Akuntansi Pemerintahan

Diterima dan disyahkan Pada tanggal,

Pembimbing,

(Betri Siradjuddin S.E, Ak., M.Si)

Mengetahui

Mb Ketua Jurusan Akuntansi

Sunardi, S.E., M.Si)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Berusaha dan Berdoa adalah Kunci Sebuah kesuksesan "

(ginta, 2008)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Papa dan Mama yang tercinta
- 2. Saudara-saudaraku tersayang
- 3. Keponakan-keponakanku tersayang
- 4. Sahabat-sahabatku tersayang
- 5. Almamaterku



PRAKATA إِسْـــــــِوالْلِهِالرَّكُمْنِ الرَّكِيْــــــــــمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarohkatuh

Alhamdulillahirrobil A'lamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah" Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua Cik Adil dan Zultati dan kakakku Rama Candra (Ican) dan adikku Kurnia Febrianti (Nia) serta keluarga besarku yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Betri Siradjuddin S.E, Ak, M.Si, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan bimbingan, petunjuk, saran, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. M. Idris, S.E, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bapak Drs. H. Rosyadi, S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Bapak Drs. Sunardi, S.E. M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak M. Irfan Tarmizi, S.E, Ak, MBA.
- 4. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E, S.H. selaku Pembimbing Akademik.
- Segenap Tim Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bapak Gotri Suyanto S.E, M.Soc,Sc ,selaku Kepala Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Sahabat-sahabatku kak Hamdi, Musdie S.T, Deni (prof), Amy S.E, Cotek,
 Darman, Lia, Rangga, Aidil S.E, terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini. Semoga kita menjadi orang yang sukses Amieeeen...
- Teman-teman KKN Desa Guci Kec Ujan Mas Kab. Muara Enim yang telah memberikan kenangan yang tak terlupakan.
- 9. Teman-teman Seperjuangan Akuntansi Angkatan 2003.
- Seluruh teman-teman ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi kebaikan kalian semuanya. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabahrohkatu.

Palembang, Juli 2008 Penulis

Ginta Maanari Adil

DAFTAR ISI

HALAM	IAN JUDUL	i
PERNY.	ATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAN	IAN PENGESAHAN	iii
HALAN	IAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKA	TA	\mathbf{v}
DAFTA	R ISI	vii
DAFTA	R TABEL	x
DAFTA	R GAMBAR	хi
DAFTA	R LAMPIRAN	xii
ABSTR	AK	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Penelitian Sebelumnya	9
	B. Landasan Teori	10
	Retribusi Daerah	10
	a) Pengertian Retribusi Daerah	10
	2. Penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi dan	
	mengalami penurunan	23
	3. Faktor-faktor Penyebab Turunnya Penerimaan Retribusi	
	Daerah	23
	4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan	
	penerimaan retribusi daerah	25



BAB III	MIL	LIODELOGI FENELITIAN	
	A.	Jenis Penelitian	26
		1. Penelitian Deskriptif	26
		2. Penelitian Komperatif	26
		3. Penelitian Asosiatif	26
	B.	Tempat Penelitian	27
	C.	Operasionalisasi Variabel	27
	D.	Data yang Digunakan	28
		1. Data Primer	28
		2. Data Sekunder.	28
	E.	Teknik Pengumpulan Data	29
	F.	Analisis Data dan Teknis Analisis	30
BAB IV	PE	MBAHASAN	
	A.	Hasil Penelitian	
		1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan	
		Keuangan dan Asset Daerah	32
		2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	33
		3. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas	35
		4. Visi dan Misi	52
		5. Laporan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah	
		yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan 5	55
	B.	Pembahasan	7
		1. Laporan penerimaan retribusi daerah yang tidak	
		terealisasi dan mengalami penurunan	57
		2. Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi	
		tidak terealisasi	60
		3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan,	
		Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten	
		Musi Rawas	54

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	68

LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 :	Perkembangan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2004 s/d 2007	5
Tabel I.2:	Perkembangan target dan realisasi retribusi daerah tahun 2004 s/d 2007	.6
Tabel III. 1:	Operasionalisasi variabel	27
Tabel IV. 1:	Laporan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2004	56
Tabel IV. 2:	Data yang diolah tahun 2004.	.57
Tabel IV. 3:	Data yang diolah tahun 2005	.58
Tabel IV. 4:	Data yang diolah tahun 2006	.58
Tabel IV. 5:	Data yang diolah tahun 2007	.59

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1:	Struktur	organisasi	51
---------------	----------	------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data penerimaan pendapatan asli daerah
Lampiran 2	Surat selesai riset
Lampiran 3	Kartu aktifitas bimbingan usulan penelitian
Lampiran 4	Kartu aktifitas bimbingan skripsi
Lampiran 5	Lembaran persetujuan perbaikan skripsi
Lampiran 6	Sertifikat mengaji
Lampiran 7	Biodata penulis

ABSTRAK

Ginta Maanari Adil/222003030/Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Musi Rawas, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif dengan yaitu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih dengan membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Manfaat penelitian ini bagi unit penelitian dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah di kabupaten Musi Rawas. Bagi penulis memperluas wawasan penulis dalam bidang ilmu akuntansi khususnya penerimaan retribusi daerah. Bagi almamater dapat dijadikan bahan kajian dalam melakukan penelitian berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan retribusi tidak mencapai target dan mengalami penurunan disebabkan karena faktor internal yaitu penetapan target yang terlalu tinggi dan penyempurnaan jenis retribusi sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya pengawasan langsung kelokasi penerimaan retribusi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan memperbaiki sarana dan prasaran yang sudah ada, dan dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah Kabupaten Musi Rawas adalah bervariasi dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Retribusi daerah, faktor internal dan eksternal, target dan realisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan dalam pemerintah Republik Indonesia dilaksanakan secara bertahap melalui repelita dan keseimbangan yang terutang dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang disegala kehidupan. Pembangunan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran merupakan suatu upaya untuk memberikan yang terbaik baik kehidupan rakyat Indonesia.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional terdapat tiga pelaku ekonomi yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Suatu perusahaan yang baik dituntut untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kelangsungan hidupnya. Perusahaan baik BUMN maupun swasta dalam melaksanakan pembangunan melalui penyelesaian persoalan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi saat ini lebih dititik beratkan pada sektor perekonomian yang banyak melibatkan rakyat kecil sehubungan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang dalam tahun terakhir ini sangat memprihatinkan sehingga menyebabkan turunnya pendapatan baik yang diterima di daerah maupun pusat.

Dalam menghadapi persoalan ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta dituntut untuk menjalankan roda perusahaan atau instansi dengan melakukan proyek yang sehat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi. Kesuksesan perusahaan merupakan pasukan baru Negara yang akhirnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dalam keadaan ekonomi Indonesia pada saat ini dan akan memasuki era bebas menjelang tahun yang akan datang merupakan tantangan bagi kita semua dan perusahaan baik milik Negara maupun swasta harus siap bersaing didunia internasional.

Dengan demikian kemajuan suatu perusahan besar diharapkan dapat membantu dan mendorong perusahaan-perusahaan kecil untuk lebih berkembang dalam mengoperasikan perusahaannya. Sehubungan dengan partisipasi aktif dari seluruh jajaran instansi terkait dilingkungan pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Musi Rawas. Dengan adanya suatu keterpaduan dalam rangka peningkatan pemasukan pendapatan asli daerah untuk dapat membantu lajunya pembangunan yang dirasakan semakin kompleks.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar berasal dari dalam Kabupaten Musi Rawas sendiri yang diambil dari kekayaan sumber alamnya. Dimana unsur PAD antara lain : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil BUMD dan lain-lain PAD. Retribusi berbeda dengan pajak karena retribusi ditujukan kepada orang yang mempunyai keterkaitan langsung kepada pengguna fasilitas pemerintah, maka wajarlah jika warga Negara membayar retribusi kepada pemerintah. Pada dasarnya pemerintah menarik sejumlah retribusi atas penggunaan fasilitas yang diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Memperhatikan perkembangan seluruh aspek pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang sangat pesat, maka pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Musi Rawas dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selalu berusaha seoptimal mungkin dengan segala daya dan upaya untuk menggali serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai lajunya pembangunan yang telah direncanakan.

Menyadari bahwa informasi masih sangat diperlukan dalam mengambil keputusan yang sangat cepat terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, dimana informasi tentang retribusi daerah sangat penting baik yang ditangani langsung oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah maupun yang ditangani oleh instansi terkait dengan lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas, kiranya dapat membantu bukan saja aparat pemerintah tetapi juga pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Hasil Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah mempunyai wewenang atas pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana retribusi daerah.

Untuk melihat dan membandingkan berapa besar penerimaan retribusi daerah sebagai data pendukung, berikut ini penulis akan menyajikan tabel perkembangan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan retribusi daerah terdiri dari 23 jenis retribusi ,perkembangan target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang mengalami penurunan dan target yang tidak dapat terealisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas dari Tahun 2004 s/d 2007.

Tabel I. 1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2004 s/d Tahun 2007
(Dalam Rupiah)

Jenis	Tah	un 2004	Tai	hun 2005	Tal	hun 2006	Tal	hun 2007
Penerimaan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	1.424.500.000	1.597.591.673	1.507.800.000	1.847.064.928	2.317.754.000	4.470.084.699	4.196.000.000	3.977.101.684
Retribusi Daerah	2.812.360.500	2.453.236.146	3.647.736.000	2.645.986.739	4.569.759.000	3.193.198.559	5.880.000.000	3.139.521.654
Bagian Laba Perusahaan Daerah	1.384.863.000	1.301.696.433	1.384.863.000	1.866.255.979	3.912.000.000	2.307.951.220	3.912.000.000	3.878.489.761
Pos Lain-Lain Pendapatan	4.482.526.500	4.933.074.739	4.268.666.000	7.056.680.659	9.612.000.000	19.047.546.852	12.922.525.000	3.878.489.761
Bagi Hasil Pajak	36.634.848.979	62.698.357.969	43.025.869.000	79.975.296.949	71.139.379.800	110.143.634.447	99.005.977.000	118.519.084.724
Bagi Hasil Bukan Pajak	50.975.817.543	58.628.370.526	53.077.447.000	98.316.785.806	74.100.000.000	112.339.388.219	94.061.759.000	102.182.526.441
Dana Alokasi Umum	187.256.000.000	171.651.332.600	201.781.000.000	201.781.000.000	358.997.000.000	362.073.052.435	410.612.000.000	410.612.000.000
Dana Alokasi Khusus	12.200.000.000	12.200.000.000	25.690.000	25.690.000	16.020.000.000	16.020.000.000	53.297.000.000	53.297.000.000
Bagian Lain Penerimaan Yang Syah	26.820.694.500	16.771.054.992	17.978.200.000	23.589.182.696	11.399.357.000	14.849.559.800	37.923.859.000	43.135.696.216
Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu	40.932.276.089	40.932.276.089	31.195.519.959	31.195.519.959	63.984.587.372	63.984.587.372	-	-

Sumber: Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 s/d 2007.



Dari tabel I.1 bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditarget pada tahun 2004 s/d 2007 yang terealisasi adalah Pajak Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah, Pos Lain-lain Pendapatan, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagian Lain Penerimaan yang Syah, sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah yang ditargetkan pada tahun 2004 s/d 2007 yang tidak terealisasi adalah Retribusi Daerah.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2004 s/d 2007 dapat dilihat pada tabel I.2:

Tabel I.2: Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2004 s/d 2007

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Tahun 2004	Rp 2.812.360.500	Rp 2.453.236.146	83,85
2	Tahun 2005	Rp 3.647.736.000	Rp 2.645.988.739	85,25
3	Tahun 2006	Rp 4.569.759.000	Rp 3.193.198.559	79,48
4	Tahun 2007	Rp 5.880.000.000	Rp 3.139.521.654	47,69

Sumber: Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 s/d2007.

Dari tabel I.2 dimana penerimaan retribusi daerah pada tahun 2004 s/d 2007 target penerimaan retribusi daerah belum dapat terealisasi dimana penerimaan retribusi daerah yang telah ditargetkan juga mengalami penurunan dari tahun 2004 s/d 2007 yaitu retribusi pelayanan kesehatan RSUD, retribusi pelayanan pasar, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi tempat usaha, retribusi jasa usaha terminal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas".

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar balakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengajukan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah yang ditargetkan belum dapat terealisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas?
- 2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

 Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah yang ditargetkan belum dapat terealisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan keilmuan dan memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai pelaksanaan penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi Unit Penelitian

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Rawas.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan kajian dalam penyusunan penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul : "Evaluasi Peranan Penerimaan Retribusi Pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang". Telah dilakukan oleh Zahra Mustika (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana perimbangan antara penerimaan lainnya bagi Dinas Pandapatan Daerah Tingkat II Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perimbangan antara penerimaan lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Palembang. Variabel yang digunakan adalah untuk mengetahui penerimaan retribusi daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang bervariasi dari tahun-ketahun, sehingga tingkat penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang ini belum terealisasi dalam penerimaan retribusi daerah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah terdapat pada tempat penelitian, dimana tempat penelitian yang diteliti oleh penelitian sebelumnya dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Palembang, sedangkan tempat penelitian yang diteliti oleh penulis dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi

Rawas. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah membahas penerimaan retribusi daerah.

B. Landasan Teori

Dalam penulisan usulan penelitian ini penulis akan mencoba menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas, yaitu :

1. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah suatu pungutan daerah yang diperuntukkan sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik daerah karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik jasa langsung maupun tidak langsung.

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah mempunyai wewenang atas pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana retribusi daerah.

Menurut Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Bab 1 Ayat 26 dijelaskan bahwa pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Ahmad Yani (2002:55), menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Abdul Halim (2002:64), menyatakan bahwa Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari kontribusi daerah.

Menurut Indra Bastian dan Gatot Supriyanto (2003:90), menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002:100), menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Suparmoko (2002:85), menyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Sedangkan didalam Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat (2). Retribusi dibagi atas tiga golongan :

a) Retribusi Jasa Umum

1. Pengertian Retribusi Jasa Umum

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1.
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.

2. Kriteria Retribusi Jasa Umum

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

3. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 2, sebagai berikut :

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
 - Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
 Catatan Sipil

Akta Catatan Sipil meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

f) Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaran bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alatalat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (peta struktur).

j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Subjek, Wajib Retribusi Jasa Umum dan Objek Retribusi Jasa Umum

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:440), menyatakan subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi Jasa Usaha

1. Pengertian Retribusi Jasa Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 1 ayat 4 menyatakan retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

2. Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar.

3. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2, sebagai berikut :

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah.

b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

c) Retribusi Tempat Pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

d) Retribusi Jasa Usaha Terminal

Pelayanan jasa usaha terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan milik swasta.

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah Pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

g) Retribusi Penyedotan Kakus

Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

h) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh

pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

1) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah Pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan atau dimiliki pemerintah daerah, tidak termasukyang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produsi usaha pemerintah daerah antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4. Subjek, Wajib Retribusi Jasa Umum dan Objek Retribusi Jasa Umum

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:440), subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa

umum yang bersangkutan, Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan darah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

1. Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 1 ayat 5 menyatakan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi/badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian serta pengawasan, pada dasarnya pemberian izin pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Karena

dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut.

2. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf (c), retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaran izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2, sebagai berikut :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya, agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku,

dengan tetap memerhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbukan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

d. Retribusi Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayana angkutan penumpangumum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

4. Subjek, Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dan Objek Perizinan Tertentu

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:447), subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu. Objek

retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan

Terdapat 6 jenis penerimaan retribusi yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan terhadap sektor retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD
- 2) Retribusi Pelayanan Pasar
- 3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 4) Retribusi Izin Gangguan
- 5) Retribusi Izin Tempat Usaha
- 6) Retribusi Jasa Usaha Terminal
- 3. Faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya penerimaan retribusi daerah

Menurut Abdul Halim dan Jamal Abdul Hasan (2006:48-49), menyatakan suatu indikator yang menyebabkan target penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
 - 1) Penetapan target penerimaan retribusi daerah yang terlalu tinggi.
 - 2) Rencana dan penyusunan program kerja yang tidak efektif.



- 3) Kurangnya melakukan kebijaksanaan tehnik, pemberian bimbingan dan pembinaan serta koordinasi tehnik bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sektor penerimaan retribusi daerah.
- 4) Perencanan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian evaluasi serta pengembangan pemungutan pendapatan daerah atau retribusi daerah yang tidak berjalan dengan baik.
- 5) Kurang optimalnya pelaksanaan tehnik administrasi.

b. Faktor Eksternal

- Penyediaan fasilitas retribusi daerah yang telah disediakan oleh Pemerintah belum digunakan sepenuhnya oleh masyarakat pengguna fasilitas tersebut sehingga penerimaan terhadap sektor retribusi mengalami penurunan.
- Kurangnya pemantauan atau peninjauan langsung kelokasi yang dituju sebagai sumber penerimaan terhadap pendapatan daerah atau retribusi daerah.
- Pemerintah Kabupaten tidak menciptakan sumber-sumber penghasilan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya terhadap sektor retribusi daerah.
- 4) Kurangnya kerja sama dari tim Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam mengoperasikan sumber-sumber penghasilan atau penerimaan retribusi daerah dengan pihak luar atau perusahaan lainnya.

4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- Memperbaiki/memperbaharui fasilitas sarana dan prasarana yang telah tersedia.
- 2. Kualitas pelayanan yang baik atau memuaskan.
- 3. Bertambahnya kenyamanan dan perasaan menyenangkan.

Menurut Kunarjo (2001: 178), menyatakan bahwa upaya-upaya untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan, pada umumnya pemerintah dapat melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan intensifikasi dan pendekatan ekstensifikasi.

- 1. Pendekatan intensifikasi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan.
 - Koordinasi antara karyawan dan instansi terkait dikembangkan.
 - c. Kualitas pelayanan diperbaiki.
- 2. Pendekatan ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pendekatan objek dan subjek pajak retribusi.
 - b. Penggalian sumber-sumber baru.
 - c. Pembuatan peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

BABIII

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2001:11), jenis penelitian jika ditinjau dari tingkat eksplansinya ada tiga macam, yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk yang lebih dari satu dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Penelitian Asosiatif atau Hubungan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan, dimana membandingkan antara penerimaan retribusi daerah dari tahun ketahun.



B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas yang beralamat di jalan Yos Sudarso Telepon (0733) 451321 Fax (0733) 451321 Lubuk Linggau.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 1 Operasionalisasi variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penerimaan	Macam-macam penerimaan	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
retribusi	retribusi daerah yang tidak	RSUD.
daerah yang	terealisasi dan mengalami	2. Retribusi Pelayanan Pasar.
tidak	penurunan	3. Retribusi Izin Mendirikan
terealisasi dan		Bangunan.
mengalami		4. Retribusi Izin Gangguan
penurunan		5. Retribusi Izin Tempat Usaha.
		6. Retribusi Jasa Usaha Terminal.
Faktor-faktor	Suatu indikator yang	1. Faktor internal :
yang	menyebabkan target penerimaan	a. Penetapan target retribusi
menyebabkan	retribusi daerah tidak terealisasi	daerah yang terlalu tinggi.
tidak	setiap tahun.	b. Penyempurnaan jenis retribusi
terealisasinya		daerah.
penerimaan		2. Faktor eksternal : kurangnya
Retribusi		pengendalian dan pengawasan
Daerah		terhadap peninjauan langsung
		kelokasi penerimaan retribusi
	÷	daerah.
Upaya-upaya	Usaha-usaha untuk mencapai	1. Memperbaiki/memperbaharui
yang	suatu masalah, memecahkan	fasilitas saran dan prasarana
dilakukan oleh	persoalan untuk mencari jalan	yang telah tersedia.
Dinas	keluar dalam meningkatkan	2. Kualitas yang baik atau
Pendapatan,	penerimaan retribusi daerah	memuaskan
Pengelolaan		3. Bertambahnya kenyamanan dan
Keuangan dan		perasaan menyenangkan
Asset Daerah		

Sumber: Penulis, 2008

D. Data Yang Diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146), menyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Berupa opini subyek (orang) secara individual, kelompok, hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian. Misalnya hasil wawancara, dan hasil dokumentasi.

Data Sekunder

Yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu terdiri dari :

- a. Peraturan Bupati Musi Rawas nomor 1 tahun 2008 tentang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Gambaran umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
 Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- c. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi setiap sub Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- d. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Musi Rawas.
- f. Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- g. Laporan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan dari tahun 2004 s/d 2007.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo (2002:122-124), menyatakan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan dalam penelitian.

2. Survey

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan instrument pertanyaan untuk meminta tanggapan dari responden tentang sample.

3. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

4. Kuisioner (angket)

Yaitu melalui media, atau berbeda dalam bentuknya, pada pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

5. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan dokumentasi yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diarsip di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:32-33) menyatakan bahwa metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kualitatif

Yaitu analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

2. Analisis Kuantitatif

Yaitu analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Dalam penelitian ini metode analisis yang akan digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang tidak berbentuk angka atau dengan cara membandingkan antara teori-teori yang ada dengan perumusan yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan tabel, dan uraian penjelasan mengenai penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

 Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Kabupaten Musi Rawas yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama diseluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah No 3 tahun 1990. seiring dengan berlakunya otonomi daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah mengalami perubahan baik dari segi tugas, fungsi serta struktur dan kedudukan sebagai realisasinya, pada tanggal 2 januari 2001 dikeluarkan peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas No 2 tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan dan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang mengacu atau sejalan dengan ketentuan peraturan pemerintah No 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, selanjutnya pada tanggal 31 januari 2008 dikeluarkan Peraturan Bupati Musi Rawas No 2 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas berlokasi dijalan Yos Sudarso Telepon (0733)



451321 Fax (0733) 451321 Lubuk Linggau. Wilayah kerja dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas meliputi kecamatan Jayaloka, kecamatan muara kelingi, kecamatan muara lakitan, kecamatan petunang, dan kecamatan muara beliti.

 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 pasal 3, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis dan program kerja dibidang Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro dibidang
 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- c. Melaksanakan koordinasi pendaftaran, pendataan Wajib Pajak, Wajib Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah Lainnya, penyusunan program, perubahan dan perhitungan APBD serta pengelolaan Administrasi Keuangan dan Asset Daerah.
- d. Penyusunan perencanan dan pengendalian operasional dibidang Pendataan, Penetapan, Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan Pendapatan, Belanja dan Asset Daerah.
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- Melaksanakan urusan tata usaha.
- h. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
- i. Menyimpan uang daerah.
- Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- k. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- Melaksanakan pencatatan barang milik daerah/asset daerah melalui proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta membuat neraca daerah sebagai bagian dari laporan keuangan daerah.

 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh sekretariat dinas, didalam melaksanakan tugasnya kepala dinas membawahi tiga sub dinas atau sub bagian, melainkan sebagian unit yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas. Sub dinas ini merupakan sub bagian yang disebut seksi-seksi. Selain membawahi ketiga sub dinas tersebut, kepala dinas juga membawahi bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), kelompok jabatan fungsional. Berikut ini akan dipaparkan susunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, program, kepegawain, keuangan dan perlengkapan.

Bagian sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

Melaksanakan pelayanan admanistratif dilingkungan Dinas
 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

- Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain dalam penyusunan rencana dan pengendalian program kerja.
- Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
- Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada
 Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan urusan surat menyurat, perjalanan dinas, kearsipan, protokol, urusan rumah tangga.
 - b) Melaksanakan urusan kepegawaian.
 - c) Merencanakan dan menganalisa kebutuhan kepegawaian.
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - e) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dibidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Menyiapkan dan menyusun rencana serta melakukan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran SKPD.
 - b) Menyusun Laporan Keuangan SKPD.

- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dibidang tugasnya.

3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan, menganalisa kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
- b) Inventarisasi dan pelaporan barang dan asset SKPD.
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d) dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah kebijaksanaan dan tindakan-tindakandibidang tugasnya.

c. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perumusan, kebijakan teknis dan melaksanakan tugas dibidang pendataan, penetapan, penagihan pajak, dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.

Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Melakukan perhitungan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
- Menerbitkan surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait/pengelola pendapatan asli daerah.

Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- 1) Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam tugasnya, melaksanakan pendaftaran dan pendataan subjek/objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya, memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD), dan melakukan verifikasi lapangan terhadap data subjek dan objek WP/WR.
- 2) Seksi Penetapan, Keberatan dan Penghapusan mempunyai tugas menghitung dan menetapkan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah, menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menerbitkan dan mendistribusikan serta mengarsipkan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah, menerima dan memproses usul keberatan dan banding atas materi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak.
- 3) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, melaporkan hasil penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, dan menyiapkan surat teguran dan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain

Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain.

Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menghimpun pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Penerimaan Lainlain.
- Melakukan kegiatan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain.
- Melakukan kegiatan koordinasi denga dinas/instansi terkait baik dalam rangka penerimaan maupun pencairan dana yang berasal dari Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain.
- Membantu Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pendistribusian SPPT-PBB kepada wajib pajak.
- Membantu Kepala Desa/Lurah dalam rangka penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain terdiri dari :

 Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak (BHP), dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan

- pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bagi Hasil Bukan Pajak, menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan Bagi Hasil Bukan Pajak, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan Bagi Hasi Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Seksi Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Penerimaan Lain-lain, melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait baik dalam rangka peningkatan penerimaan maupun pencairan dana yang bersumber dari Penerimaan Lain-lain, dan menyiapkan surat permintaan pencairan dana yang berasal dari Penerimaan Lain-lain.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melakukan pencatatan/pembukuan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
- 2) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

- Meneliti dan mengevaluasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka rapat evaluasi penerimaan daerah.
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksaan anggaran secara berkala yaitu triwulan, semester dan tahunan.
- Mengkoordinasi dan monitoring pelaksanaan unit akuntansi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
- Melakukan pelaporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 9) Menyajikan informasi keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

- Seksi Pembukuan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pencatatan/pembukuan ketetapan, target dan realisasi pendapatan daerah, dan melakukan penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai penerimaan daerah, serta melakukan pencatatan/pembukuan penerimaan benda berharga.
- 2) Seksi Pembukuan Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta meneliti dan memeriksa realisasi belanja daerah, dan melakukan penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai belanja daerah, serta melakukan penelitian dan pemeriksaan proses pembukuan belanja daerah.

3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pelaporan Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menyusun bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala yaitu triwulan, semester dan tahunan. Menyiapkan bahan dalam rangka perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan menyiapkan data mengenai perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menyajikan informasi keuangan daerah.

f. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan dibidang anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menghimpun data dan menyusun program kerja tahunan yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep nota keuangan sebagai pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang akan disampaikan kepada DPRD.
- Menerima dan mengolah data rencana anggaran pada setiap SKPD yang disusun dalam Rencana Anggaran SKPD dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- Menerima dan mengolah data dalam rangka penyusunan naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Melakukan penelitian terhadap Surat Perintah Penyediaan Dana (SPD)
 yang disampaikan oleh unit kerja atau instansi terkait bidang tugasnya.
- 6) Melakukan pencatatan administrasi setiap pengeluaran yang membebani anggaran belanja kedalam kartu pengawasan kredit pada setiap pasal berkenaan.
- 7) Mengelola dan menatausahakan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, belanja bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja tidak terduga.
- 8) Meneruskan dan menyampaikan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan nota persetujuan yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwewenang kepada sub bagian perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut.

Bidang Anggaran terdiri dari:

1) Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyusun RAPBD dan rancangan APBD perubahan yang berasal dari belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, belanja bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja tidak terduga. Mengelola dan menatausahakan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, belanja bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja tidak terduga. Melakukan koordinasi atas revisi DPA SKPD khusus belanja tidak langsung.

Mengesahkan DPA SKPD khusus belanja tidak langsung. Melakukan pencatatan terhadap Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) khusus belanja tidak langsung.

- 2) Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas menyusun RAPBD dan rancangan APBD perubahan yang berasal dari belanja langsung. Melakukan koordinasi atas revisi DPA SKPD khusus belanja langsung. Melakukan pencatatan terhadap surat permintaan penyediaan dana khusus belanja langsung. Membukukan kedalam register SPD dan nota persetujuan khusus belanja langsung, dan meneruskan serta menyampaikan SPD dan nota persetujuan khusus belanja langsung yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada bidang perbendaharaan untuk proses lebih lanjut.
- 3) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun dan menyusun rencana kegiatan dari masing-masing SKPD. Menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD perubahan. Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan APBD, dan melakukan koordinasi dengan Tim Perencana Anggaran Daerah.

g. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

 Memeriksa kebenaran serta menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

- Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah dibidang perbendaharaan.
- 3) Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Menguji kebenaran penagihan SPM dari setiap SKPD dan menyiapkan anggaran kas.
- Menerima, menyimpan dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah.
- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk.
- Melaksanakan penempatan uang daerah dan megelola/menatausahakan investasi.
- Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
- 9) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
- 10) Melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

1) Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyiapkan SP2D khusus belanja tidak langsung. Memeriksa dan meneliti berkas SPM beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh SKPD serta membina penatausahaan keuangan SKPD khusus belanja tidak langsung. Menerima, menyiapkan dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah khusus belanja tidak langsung. Menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus

kas, serta memantau pelaksanaan realisasi belanja tidak langsung, dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening umum daerah khusus belanja tidak langsung.

- 2) Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan SP2D khusus belanja langsung. Memeriksa dan meneliti berkas SPM beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh SKPD serta membina penatausahaan keuangan SKPD khusus belanja langsung. Menerima, menyiapkan dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah khusus belanja langsung. Menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus kas, serta memantau pelaksanaan realisasi belanja langsung, dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening umum daerah khusus belanja langsung.
- 3) Seksi TPTGR mempunyai tugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah. Menginventarisasi data ganti kerugian daerah. Melakukan tuntutan ganti rugi atas kerugian daerah. Menyiapkan pembentukan Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Dan menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah. Serta mengelola investasi daerah.

h. Bidang Asset Daerah

Bidang Asset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengurusan asset daerah. Bidang Asset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan pencatatan barang milik daerah (Asset Daerah) melalui proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta membuat neraca daerah sebagai bagian dari laporan keuangan daerah.
- Menghimpun, mengidentifikasi daftar data nominal barang-barang milik daerah /kekayaan daerah sebagai bahan informasi pencatatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusa barang milik daerah.
- 5) Melakukan pengurangan, penganalisaan, penyiapan, penginterprestasi serta menyusun neraca barang/kekayaan daerah secara kronologis, sistematif, akuntabel, dan periodik.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Asset Daerah terdiri dari:

- Seksi Analisa Kebutuhan mempunyai tugas menganalisa semua jenis kebutuhan yang diperlukan, dan menetapkan pedoman, sasaran dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan penyediaan barang yang dibutuhkan.
- 2) Seksi Inventarisasi mempunyai tugas menginventarisasi semua jenis Asset Daerah. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang inventaris/Asset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas menyimpan dan memelihara seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah. Memelihara semua Asset Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Memanfaatkan barang milik/dikuasai daerah tanpa merubah status kepemilikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengamankan barang milik/dikuasai daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum,dan menyiapkan berkas penghapusan Asset Daerah.

i. Bidang Verifikasi dan Pengendalian

Bidang Verifikasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Verifikasi dan Pengendalian.

Bidang Verifikasi dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti mengenai realisasi anggaran.
- Menyusun konsep Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan/keputusan Bupati yang berkaitan dengan penerimaan daerah dan semua Keputusan Kepala Daerah.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Memberikan saran-saran pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala
 Dinas tentang langkah-langkah kebijaksanaan dalam bidang tugasnya.

Bidang Verifikasi dan Pengendalian terdiri dari :

- Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti mengenai realisasi anggaran, melakukan penelitian tentang realisasi anggaran kegiatan yang dikelola oleh SKPD, dan melakukan verifikasi terhadap anggaran keuangan daerah.
- Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD dan Pendapatan Daerah lainnya, dan melakukan pengawasan terhadaparus penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Seksi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menghimpun peraturan dan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah, melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah, dan melakukan pengkajian sumber-sumber Pendapatan Daerah.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di wilayah yang bersangkutan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan administrasi
- Mengkoordinir pemungutan PBB dan PAD diwilayah kerja masingmasing.
- 3) Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBBdan PAD.
- 4) Melakukan inventarisasi asset daerah yang berada diwilayah kerjanya.

- Bersama-sama dengan Camat menyampaikan SPPT-PBB kepada Kades/Lurah serta memonitor pelaksanaan penyampaiannya kepada wajib pajak.
- Memonitor pelaksanaan penagihan PBB yang dilakukan oleh Kades/Lurah.

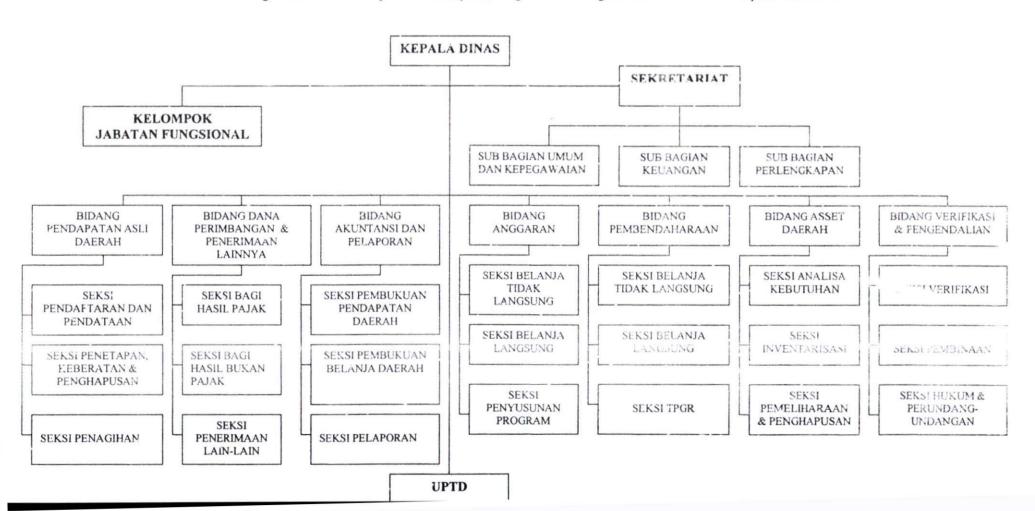
k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan terdiri dari yaitu :

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 24 keputusan ini, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
 pasal 24 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat
 pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar IV. 1

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas



Stuktur organisasi menunjukkan tentang struktur dan tata kerja serta wewenang secara formal pada setiap fungsi organisasi adalah berstruktur, tempat orang berorientasi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan untuk menunjukan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai atau tidak saling tumpang tindih, diperlukan suatu struktur organisasi. Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi diingat juga bahwa peranan struktur pada setiap jenis organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya. Pada akhirnya diharapkan kedisiplinan kerja lebih terjamin dan dapat di inventarisasikan secara efektif dan efisien.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
 Daerah Kabupaten Musi Rawas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas pada visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Visi
 - " Meningkatkan pendapatan daerah yang mampu menunjang pembangunan kabupaten musi rawas"
- 2) Misi
 - Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pemungutan pendapatan daerah.



- b. Mengusulkan rancangan Peraturan Daerah (PERDA) dibidang pajak dan retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
- c. Melaksanakan penegakan hukum (law enforcement)
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas
 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- e. Mengusahakan Pinjaman Daerah.

3) Tujuan dan Sasaran

Perumusan dalam penetapan tujuan dan sasaran merupakan hasil kajian yang dilakukan dari misi, dan arah dalam daya upaya mencapai misi sebagaimana yang elah ditetapkan. Dalam rangka mencapai misi sebagaimana yang telah dikemukakan maka rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a) Tujuan

- Meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan pembungunan agropolitan distrik dan pembiayaan infrastruktur utama.
- (3) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, PBB, BPHTB, serta jenis pungutan lainnya guna membiayai pembangunan daerah.
- (4) Dengan upaya Intensifikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menggali sumber-sumber

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional khususnya dibidang pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lainnya yang syah.

(5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, berdisiplin dan memiliki karakter yang baik serta berwawasan dan mempunyai keterampilan yang tinggi, professional dalam bidang tugasnya.

b) Sasaran

- Meningkatkan penerimaan PAD, PBB, BPHTB dan Sumbersumber penerimaan daerah lainnya.
- (2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber peneriaan daerah.
- (3) Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah kepada WP/WR.
- (4) Penyusunan rancangan dan atau perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
- (5) Proaktif menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.
- (6) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah.
- (7) Penerapan sanksi (law enforcement) bagi wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajiban.

- (8) Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (9) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, melalui pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya, dan study banding ke Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
- (10) Mengamankan target penerimaan daerah yang telah ditetapkan APBD Kabupaten Musi Rawas guna menopang kegiatan Pemerintah Daerah baik belanja rutin maupun pembangunan.
- Laporan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan.

Sebagai asumsi dan perbandingan dalam pencapaian target dan realisasi penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas selama 4 tahun (2004-2007) dapat digambarkan berdasarkan tabel berikut ini retribusi daerah yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir :

Tabel IV. 1
Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 s/d Tahun 2007
(Dalam Rupiah)

No Jenis Retribusi		Tahur	2004	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	1.770.862.500	1.644.952.475	2.427.900.000	1.838.792.820	2.426.359.000	2.324.750.128	3.100.000.000	2.296.419.162
2	Retribusi Pelayanan Pasar	146.652.000	92.006.745	159.990.000	104.219.315	623.400.000	254.982.620	1.000.000.000	350.338.990
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	130.000.000	128.313.426	275.000.000	284.629.704	350.000.000	209.106.561	350.338.990	160.232.552
4	Retribusi Izin Gangguan	55.000.000	39.700.000	65.000.000	71.300.000	100.000.000	98.102.000	150.000.000	79.850.000
5	Retribusi Izin Tempat Usaha	25.000.000	25.040.000	35.000.000	39.380.000	70.000.000	59.050.000	100.000.000	65.350.000
6	tribusi Jasa Usaha Terminal	25.040.000	523.223.500	684.846.000	307.664.900	1.000.000.000	247.207.250	1.150.000.000	187.330.950
	Jumlah	2.812.360.500	2.453.236.146	3.647.736.000	2.645.986.739	4.569.759.000	3.193.198.559	5.880.000.000	3.139.521.654

Sumber: Data Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 s/d Tahun 2007.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

 Laporan penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan dari tahun 2004 s/d 2007.

Tabel IV. 2 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 (Dalam Rupiah)

Jenis-jenis Retribusi	Target	Realisasi	Persentase %
Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	1.770.862.500	1.644.952.475	92,89
Retribusi Pelayanan Pasar	146.652.000	92.006.745	62,74
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	130.000.000	128.313.426	98,70
Retribusi Izin Gangguan	55.000.000	39.700.000	72,18
Retribusi Izin Tempat Usaha	25.000.000	25.040.000	100,16
Retribusi Jasa Usaha Terminal	684.846.000	523.223.500	76,40
Jumlah	2.812.360.500	2.453.236.146	83,85
	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Tempat Usaha Retribusi Jasa Usaha Terminal	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Tempat Usaha Retribusi Jasa Usaha Terminal 1.770.862.500 146.652.000 130.000.000 25.000.000 684.846.000	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD 1.770.862.500 1.644.952.475 Retribusi Pelayanan Pasar 146.652.000 92.006.745 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 130.000.000 128.313.426 Retribusi Izin Gangguan 55.000.000 39.700.000 Retribusi Izin Tempat Usaha 25.000.000 25.040.000 Retribusi Jasa Usaha Terminal 684.846.000 523.223.500

Sumber: Data yang diolah, 2008.

Dari tabel IV.2 sangat terlihat jelas dimana penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan, pada tahun 2004 penerimaan retribusi daerah yang terealisasi sebesar 83,85 % dari yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Tabel IV. 3 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 (Dalam Rupiah)

No	Jenis-jenis Retribusi	Target	Realisasi	Persentase %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	2.427.900.000	1.838.792.820	75,74
2	Retribusi Pelayanan Pasar	159.990.000	104.219.315	65,14
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	275.000.000	284.629.704	103,50
4	Retribusi Izin Gangguan	65.000.000	71.300.000	109,69
5	Retribusi Izin Tempat Usaha	35.000.000	39.380.000	112,51
6	Retribusi Jasa Usaha Terminal	684.846.000	307.664.900	44,92
	Jumlah	3.647.736.000	2.645.986.739	85,25

Sumber: Data yang diolah, 2008.

Dari tabel IV.3 sangat terlihat jelas dimana penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi, dimana penerimaan retribusi daerah pada tahun 2004 yang terealisasi sebesar 83, 85 % sedangkan pada tahun 2005 penerimaan retribusi daerah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan yang terealisasi sebesar 85,25 % dari yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Tabel IV. 4 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 (Dalam Rupiah)

No	Jenis-jenis Retribusi	Target	Realisasi	Persentase %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	2.426.359.000	2.324.750.128	95,81
2	Retribusi Pelayanan Pasar	623.400.000	254.982.620	40,90
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000	209.106.561	59,74
4	Retribusi Izin Gangguan	100.000.000	98.102.000	98,10
5	Retribusi Izin Tempat Usaha	70.000.000	59.050.000	84,36
6	Retribusi Jasa Usaha Terminal	1.000.000.000	247.207.250	24,72
	Jumlah	4.569.759.000	3.193.198.559	79,48

Sumber: Data yang diolah, 2008.

Dari tabel IV.4 sangat terlihat jelas dimana penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan, dimana penerimaan retribusi daerah pada tahun 2005 sebesar 85,25 % sedangkan pada tahun 2006 penerimaan retribusi daerah mengalami penurunaan dimana yang terealisasi hanya sebesar 79,48 % dari yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Tabel IV. 5 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 (Dalam Rupiah)

No	Jenis-jenis Retribusi	Target	Realisasi	Persentase %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	3.100.000.000	2.296.419.162	74,08
2	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000	350.338.990	35,03
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	380.000.000	160.232.552	42,17
4	Retribusi Izin Gangguan	150.000.000	79.850.000	53,23
5	Retribusi Izin Tempat Usaha	100.000.000	65.350,000	65,35
6	Retribusi Jasa Usaha Terminal	1.150.000.000	187.330.950	16,29
	Jumlah	5.880.000.000	3.139.521.654	47,69
		1		

Sumber: Data yang diolah, 2008.

Dari tabel IV.5 sangat terlihat jelas dimana penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi dan mengalami penurunan, dimana penerimaan retribusi daerah pada tahun 2006 sebesar 79, 48 % sedangkan pada tahun 2007 penerimaan retribusi daerah mengalami penurunaan yang terealisasi hanya sebesar 47,69 % dari yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.



 Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan retribusi daerah

Dalam pembahasan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pemerintah dari sektor retribusi tidak terealisasi sehingga pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

a. Faktor internal

1) Penetapan target retribusi daerah yang terlalu tinggi

Masih banyaknya kelemahan dalam penetapan target retribusi yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Karena target penerimaan retribusi ini bukan ditetapkan oleh Dinas melainkan ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah yang memungut retribusi tersebut. Sehingga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tidak dapat menentukan berapa besar masing-masing instansi pemerintah yang memungut retribusi. Sehingga mengakibatkan masih banyaknya jenis retribusi yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan setiap tahunnya.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas harus dapat menentukan besarnya target penerimaan masing-masing retribusi daerah dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasaran yang telah tersedia agar dapat menunjang penerimaan retribusi daerah pada tahun ini dan yang akan datang, sehingga instansi pemerintah yang memungut retribusi tersebut akan berupaya mencapai target yang

ditetapkan agar kinerja instansi pemerintah tersebut dapat dinilai baik oleh pemerintah dan dapat dijadikan contoh untuk masing-masing instansi pemerintah yang belum dapat menjalankan tugasnya dalam pencapaian target penerimaan retribusi daerah tersebut.

2) Penyempurnaan jenis retribusi

Disempurnakannya jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dari 19 jenis retribusi yang dipungut pada tahun 2004. pada tahun 2006 bertambah 3 jenis retribusi, yang mana ketiga retribusi tersebut seperti : retribusi sewa alat-alat berat, retribusi rumah potong hewan, dan retribusi izin usaha industri. Sehingga berakibat semakin besarnya target yang ditetapkan tersebut tidak dapat dicapai dengan baik oleh tiap-tiap instansi yang memungut retribusi tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan bimbingan dan pembinaan kepada instansi pemerintah yang penerimaannya yang tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga hal tersebut tidak terulang lagi pada tahun berikutnya.

3) Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD tidak terealisasi dan mengalami penurunan disebabkan faktor yaitu adanya rumah-rumah sakit swasta yang dibangun antara lain: Rumah Sakit Hapsari, Rumah Sakit Siti Aisyah, Rumah Sakit Advent, Klinik Permata Bunda, Klinik Dwi Sari, sehingga pasien yang berobat ke RSUD berkurang dan beralih ke Rumah Sakit Swasta yang ada di Lubuk Linggau.

- 4) Retribusi Pelayanan Pasar tidak terealisasi dan mengalami penurunan disebabkan faktor yaitu :
 - (1) Di Kabupaten Musi Rawas hanya ada 1 (satu) pasar yang berada di Kecamatan Tugumulyo skalanya kecil.
 - (2) Adanya kalangan/pasar mingguan yang ada disetiap Kecamatan sangat kecil sekali.
- 5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak terealisasi dan mengalami penurunan disebabkan oleh faktor yaitu pada umumnya masyarakat tidak mau mengurus izin mendirikan bangunan tetapi apabila pada saat masyarakat mau meminjam uang di Bank maka izin mendirikan bangunan harus dilampirkan sebagai syarat, maka mau tidak mau mereka mengurus izin mendirikan bangunan.
- 6) Retribusi Izin Gangguan tidak terealisasi dan mengalami penurunan disebabkan oleh faktor yaitu pada umumnya masyarakat tidak mau mengurus izin gangguan tetapi apabila pada saat masyarakat mau meminjam uang di Bank maka izin gangguan harus dilampirkan sebagai syarat, maka mau tidak mau mereka mengurus izin gangguan.
- 7) Retribusi Izin Tempat Usaha tidak terealisasi dan mengalami penurunan faktor yaitu pada umumnya masyakat tidak mau mengurus izin tempat usaha tetapi apabila pada saat masyarakat mau meminjam uang di Bank maka izin tempat usaha harus dilampirkan sebagai syarat, mau tidak mau mereka mengurus izin tempat usaha.

- 8) Retribusi Jasa Usaha Terminal tidak terealisasi dan mengalami penurunan faktornya disebabkan yaitu :
 - Kondisi jalan di kawasan lintas barat yang kurang baik dan rawan kejahatan.
 - (2) Kendaran Bis maupun Fuso yang melintas banyak yang melalui lintas timur.

b. Faktor eksternal

- Pengawasan penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas,
 dalam pelaksanaannya masih kurang efektif.
- 2) Pengawasan terhadap koordinasi telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas tetapi masih kurang baik karena tidak adanya komunikasi mengenai informasi-informasi yang berhubungan dengan retribusi daerah.
- Kurangnya motivasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap
 Dinas pemungut retribusi dan kepada para petugas pemungut retribusi.
- 4) Penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas sudah cukup baik yaitu dengan melakukan survey secara langsung, tetapi dalam melakukan pemeriksaan tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas masih kurang tegas dalam menindak lanjuti para petugas yang kurang



- disiplin dan para petugas yang melakukan penyelewenganpenyelewengan.
- Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas masih kurang efektif karena yang berhak mengambil keputusan adalah tergantung dengan instansi yang terkait dalam penetapan target retribusi daerah Kabupaten Musi Rawas, sehingga keputusannya hanya bersifat sepihak dan bukan keputusan bersama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- 6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas belum melaksanakan pemberian sanksi kepada karyawan, dalam hal ini terlihat pada pelaksanaan kerja yang tidak efektif.
- 7) Pemberian kompensasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pemberian gaji telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pangkat dan golongan karyawan, tetapi untuk pemberian bonus dan pendapatan lain yang berupa uang makan dan uang transport belum dilaksanakan dengan baik.
- Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas

Dalam pembahasan ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

 a) Memperbaiki/memperbaharui fasilitas saran dan prasarana yang telah tersedia

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas bersama instansi lain harus dapat memperbaiki/memperbaharui fasilitas sarana dan prasarana yang telah tersedia agar penerimaan retribusi daerah yang ada dapat terealisasi untuk tahun berikutnya, disamping itu para pengguna fasilitas saran dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat digunakan dengan baik.

b) Kualitas pelayanan yang baik atau memuaskan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui petugas pemungutan retribusi daerah dalam melaksanakan tugasnya harus jujur, disiplin, bertanggungjawab, dalam melakukan tugasnya apabila tidak dilaksanakan maka dapat diberikan sanksi pada petugas pemungutan retribusi tersebut sehingga penerimaan retribusi dapat terealisasi.

c) Bertambahnya kenyamanan dan perasaan menyenangkan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas harus menciptakan kenyamanan dan perasaan menyenangkan kepada masyarakat agar penerimaan retribusi daerah dapat meningkat untuk tahun berikutnya, serta harus terus berusaha dan bekerja keras untuk

meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan melakukan perbaikanperbaikan sehingga terciptanya kenyamanan dan perasaan menyenangkan.

- d) Upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan RSUD yaitu dimana pada tahun 2007 telah dibangun Rumah Sakit Umum yang refresentif di Kabupaten Musi Rawas tepatnya di pusat perkantoran Kabupaten Musi Rawas.
- e) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar yaitu:
 - Dalam tahun 2008 ini telah dibangun perluasan pasar di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas yang skalanya cukup besar.
 - (2) Dalam tahun 2008 ini juga telah dibangun pusat-pusat agropolitan di wilayah Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan STL Ulu Terawas, dan Kecamatan Megang Sakti.
- f) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yaitu:
 - Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan.
 - (2) Melampirkan izin mendirikan bangunan sebagai syarat pada saat peminjaman uang di Bank.

- g) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin gangguan yaitu :
 - Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurus izin gangguan.
 - (2) Melampirkan izin gangguan sebagai syarat pada saat peminjaman uang di Bank.
- h) Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin tempat usaha yaitu:
 - Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurus izin tempat usaha.
 - (2) Melampirkan izin gangguan sebagai syarat pada saat peminjaman uang di Bank.
- i) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi jasa usaha terminal yaitu :
 - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah memperbaiki jalan khususnya jalan yang melintas di kawasan lintas barat.
 - (2) Pihak keamanan terus berusaha mengurangi tingkat kejahatan khususnya dikawasan yang melintas di jalan lintas barat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan retribusi daerah
 - a. Faktor Internal
 - 1) Penetapan target retribusi daerah yang terlalu tinggi.
 - 2) Penyempurnaan jenis retribusi.
 - b. Faktor eksternal
- Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas
 - a) Memperbaiki/memperbaharui fasilitas saran dan prasarana yang telah tersedia
 - b) Kualitas pelayanan yang baik atau memuaskan
 - c) Bertambahnya kenyamanan dan perasaan menyenangkan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

 Berdasarkan faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya penerimaan retribusi daerah, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam penetapan target harus berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait agar penerimaan yang ditargetkan dapat terealisasi. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam penyempurnaan retribusi harus dilakukan peninjauan kelokasi agar penerimaan retribusi dapat terealisasi untuk tahun berikutnya.

2. Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah harus berusaha dan bekerja keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana yang tersedia, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta memperbaiki fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh wajib retribusi agar penerimaan retribusi dapat terealisasi untuk tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Jamal Abdul Hasan. 2006. Kajian Penerimaan Retribusi Daerah, Manajemen Usahawan No 06, Malang.
- Indra Bastian. 2001. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Indra Bastian dan Gatot Supriyanto. 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2002. Materi Statistik I, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian,** Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. 2002. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Sugiyono. 2001. **Metode Penelitian Bisnis,** Cetakan Kelima, Cv.Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit Harvarindo, Jakarta.

Skripsi:

Zahra Mustika. 2007." Evaluasi Peranan Penerimaan Retribusi Pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang", Skripsi Universitas Bina Darma Palembang. (Tidak Dipublikasikan)

REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ABLI DAERAH (P/JD) DAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DALAM KAB. MUSIRAWAS TAHUN ANGGARAN 2001 BULAN: DESEMBER 2004

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

JENIS PENERIMAAN	TARGET		REALISASI] %
	1.MGET	AN ROTAN FATO	ROTVU INI	S/U. BULAN INI	"ASE
2	3	4	5	6	7
. PAJAK DAERAH					
UI. KESTUKAN	33.000,000,00	28 856 500,00	4 146,500,00	33 003.000,00	100.0
UZ. HIBURAN	1.500,000,00	3 534 800,00	540.000,00	4 074 800,00	171.5
U3. REKLAME	15.000.000,00	14.407.960,00	593.00:,00	15 000 960,00	100,0
U4. PENEKANGAN JALAN	5 '5 000,000,00	546.385.895,00	127 933.358,00	674 313 253,00	117.2
GOLONGAN C	00,000 000,00 fs	738.726.127,00	132,467,533,00	8.1 193.660,00	108,9
JUMLAHI	1 121.500.000,00	1.331.911.282,00	265.680.39 ,00	1.597.591.673,00	112,1
2. RÉTRIBUSI DAERAH LESEMATAN					
01.01 KSU \$	1.7.0.862.500,00	1,485,376.885.00	159.581.590.00	1,644,952,475.00	92,3
01.13 DINAS KESEHATAN	300.000.000,00	285,487,600.00			1
UZ. PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN	4.500.000,00	4.460.000,00			1
A RIVA CFIVK :		4			02,0
US. PENGGANTIAN BIAYA CETAK KIP	10,000,000,00	7 392,500,00	8.662.500,00	16.055.000,00	00,3
DA. PENGGANTAN BIAYA CETAK AKTE CATATAN SIGI	98 620,000,00	W. Schwarzenstein	2.135.000.00	85 101.500.00	
US. PELAYANAN PARKIK	11.500.000,00		625.000,00	11.975.000.00	
US. PELAYANAN PASAK	1.16.652.000,00			92.006.745,00	
IV. PENGUJIAN KENDARAAN BERMUTCIK (KIK)	182.578.000,00	and the second s	19.116.280,00	176-421.350,00	100000000000000000000000000000000000000
III. JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	17.000.000,00	15.15€.700,00	2.004.000,00	17 16 700,00	
HASA USAHA PASAR GRUSIR DAN PERTOKUAN	1 000.000,000	hi .	455.295.740.00	1.120.860.324,00	
IU. JASA USAHA TERMINAL	684.848.000,00	111 1	46.389.500.00	523.227.500,00	10000 Miles
11. PELABUHAN KAPAL	9.878.000,00	11	9.235.000,00		4000
IZ. IZIN MENUIKIKAN BANGUNAN	130.000,000,00	109.021,476,00	19 281.950,00	128.313.426,00	
3. IZIN GANGGUAN	55.000.000,00	39.150,000,00	550 000,00	39 700 96 7.00	
4. IZIN IRAYEK		35.150,000,00	2 460 000,00	38 475 000,00	1/6.5
5. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNA TANAH	36 115,000,00	0.00		N. ASSESSED	
I. IZIN TEMPAT USAHA	00,00	22.5€0,000,00	0,00 2,480,000,00	0,00 25.040.000,00	100,00
I. UANG LEGES	25.000.000,00	197.595.990,00	2.4 302.085,00	221 898.075.00	140,9
041ZIN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG	157,397,900,00 500,000,00	1.000,000,00	200.000,00	1.200.000,00	240,00
JUMLAH II	4.616.449.400,00	3.683.715.900,00	784.389.045,00	4.468.104.945,00	-
	1.010.149.400,00	3.003.713.900,00	784,389.0+3,00	4.400.104.545,00	9618
HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH BAGIAN LABA MERUSAHAAN DAERAH		67 205 624 00	1 224 400 701 62	1 201 505 122 00	() (0
JUMPLAH IR	1 384.863.000,00	67.205.634,00	1 234.490.795,60	1.301 696.433,00	13,59
	1.334.863.000,00	67.205.634,00	1.234,490.799,00	1,301.696.433,00	1,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN					
HASIL PENJUALAN MILIK DALIGAN	150,000,000,00	168.516.664,00	27.595.691,00	196.112 355,00	0.74
PENERIMAAN JASA GIRO	3.700,028,500,00	1.327.707.584,00	108 010.30£ 00	1.435.717 392,00	3 1,80
11 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	32.500,000,00	7.580.200,00	24.92(.000,00	32.500 200,00	(0,00
IZ DINAS KEHUTANAN	1,.10,000,000,00	394.638.800,00	32.088.400,00	426.727.200,00	7:,12
13 PENEKIMAN LAIN-LAIN	0,00	1.933.531.017,00	908.486.075,00	2.842.017.092,00	7:
JUMLAH IV	4.462.526.500,00	3.831.974.265,00	1.101.100.474,00	4.933.074.739,00	111,05
JUMPAH LEY (LYAD)	11.938.338.900,00	8.914.807.081,00	3.385.660.709,00	12.300.467.790,00	193,03

		SO. BODAN DALU	JULAN INI	SALI BOTVIL MI	
2	3	4	5	6	T
V. 1.01.0500.2.1.01, BAGI HASIL PAIAK				1	T
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	1	I.		1	1
1.01.0500.2.01.01.01 PBB SEKTOR PEDESAAN	813.886.913,0	579.467.898,0	90.663.821,0	670.128 7 19.00	ol
.01.0500,2.01.01.01 PBB SEKTOR PERKOTAAN	158.598.653,00	205.403.862,0	1,099,554,0		1
.01.0500.2.01.01.01 PBB SEKTOR PERKEBUNAN	2.784.991.392.00		101000000000000000000000000000000000000		- 1
.01.0500.2.01.01.01 PBB SEKTOR PERTAMBLY NGAN MIGAS	28.101.954.845,00		30 008.223.731,0		
.01.0500.2.01.01.01 PBB SEKTOR PERTAMEANGAN HOH MIGAS	366.029.303,00				
.01.0500.2.01.01.01 PBB 8SEKTOR PERHUTANAN	454.106.250,00	555.596.144,00	- 0,00		
.01.0500.2.01.01.01 TUNGGAKAN PBB TAHUN SEBELULSTA	308.850.979,00	262,489,665,00	0.0	262,489,605,0	0
.01.0500.2.01.01.01 PENERIMAAN PBB DARI PEMERINTAH PUSAT DAN	1.304.091.000,00	0,00	658.201.391,00	658.204.199,0	0
PEMERINTAH DATI I SUM-SEL .01.0000.2.01.01.02 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN / BPHTB	1.979.862.604,00	4.009.740.229,00	1.251,295,484,00	5.321.035.713,0	0
01.0500.2,01.01.03 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	2.302.477.040.00	1 771.857.780.00	481,274,409,00	2.233.132.749,0	٦
VHYIMUL	36.634.848.979,00				-
. 1.01.0500.2.01.02. BAGI HASIL BUKAN PAJAK	30.034.848.979,00	30,227,596,511,00	32.470.761.458,00	62.698.357.1 € 3,00	0
01.0500.2.01.02.01 IURAN HASIL HUTAN / PROVISE SUMPER REMAYA	518.672.480,00	96.623.404,00	956.020.£99,00	1.052.644,408,00	0
01.0500.2.01.02.02 IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN	0.00	0,00	0,00	0.00	
01.0500,2.01.02,03 IURAN TETAP / LANDRENT	51,375,000,00				
01.0500.2.01.02.04 TURAN EKSPLORASI DAN EKPLOITASI (ROYALTI)	2.920.032.000.00		The second secon		
01.0500.2.01.02.05 IURAN KUASA USAHA PERTAMBANGAN					
01.0500.2.01.02.06 PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIXAMAN	0,00		0,00		
01.0500.2.01.02.07 PUNGUTAN HASIL PERIKANAN	0,00		5,00		1
11.0500.2.01.02.07 PUNGGTAN PASIL PERINANAN	0,00		, 0,00		1
	24.629.503.785,00	17.493.260.513,00	10.320.207.772,00		
1.0500,2.01,02.09 GAS ALAM	21.898.787.278,00	18.381.370.282,00	8.413.09-1.182,00	26.794.464.464.00	
1.0500.2.01.02.10 PENERIMAAN HAK ATAS TANAH NEGARA	0.00	0,00	0,00	0 00	1
01.0500.2.01.02.11 SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN	957.447.000,00	106,674,608,00	422.355.714,00	529.030.322,00	
JUMCASI VI	59.975.817.543,00	. 34.465.546.859,72	20,152,723,667.00	58.628.370.526,72	1
. 1.01.0500.2.2. DANA ALOKASI USBUM		11 10			1
01 0500.2.02.01. DANA ALOKASI UMUM	187.256,000,000,00	17 451,332,600,00	0.00	171.651.332.600 00	
JUMLAH VII		1771.6511382.600,00		71.651.332.600 00	!
	107,230.000,000,00	171.0311382.000,00	0,00	171.651.332.600 00	1 5
1.1.01.0500.2.3. DANA ALOKASI KHUSU8		: 11 11 1 1			
1.0500.2.03.01. REBOISASI	0,00	0,00	0,00	0.00	
1.0500.2.03.02. NON REBOISASI	12.200.000.000,00	3,060,000.000,000	8,540.000,000 00	12.200.000.000,00	1
JUMEAH VIII	12.200.000.000,00	3,660,000,000,00	8.546.000.000,00	12.200.000.00000	1
1.01.0500.3.1. PEBAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SYATE	1	1, 1			_
1.0500.3.01.01.01 PENERIMAAN DARI PEMERINTAH	23.094.998.000,00	10,733,239,800,00	0,00	10.753.239.800,00	
1.0500.3.01.01.02 PENERIMAAN DARI PROVINSI	3.725.696.500.00	6.017.815.192.00	0,00	6.017.815.192.00	1
XI HAJMUL	26.820,694,500,00	16.771.054.992,00	0.00	16.771.054.992.00	6
**************************************	25.025,034.300,00	10.771.034.332,00		10.771.034.392.00	-
101.0500.3.2. SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	40.300.070.000.00	40 000 076 000 00	2.10	10 (20 220 000 00	1
	40 932.276.089,00	40.932,276,089,00	0,00	40.932.276.089.00	-
JUNCAH X	40.932.276.089,00	40.932_276.089,00	0,00	43,932.276.089.60	10
EKAPITULASI		1	1	1	
PAJAK DAERAH	1 424.500.000,00		265.680.331 00	1.597.591 673,00	11
RETRIBUSI DAERAH	4 648.449.400,00		784.339.045,00	4 468.104.945,00	
BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH	1 384.863.000,00		1.234,190,799,00	Control of the Contro	
POS LAIN-LAIN PENDAPATAN	4.482.526.500,00		1.101,100,474,00	4.933.074.739,50	
BAGI HASIL PAJAK	36.634.848.979,00				
BAGI HASIL BUKAN PAJAK	50.975.817.543,00			58,628.370.526.72	
DANA ALOKASI UMIJM (DAU)	187.256.000.000,00			171.651.332.800,20	
DANA ALOKASI KHUSUS	12.200.000,000,00		8.540.000.000,00	12.200.000.000 30 16.771.054.992 30	
BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SYAH	26.820.694 500,00 40.932.276.089,00			40.932.278.089.00	
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU			64 550 245 424 02		
I:VJMUL	366.757.976.011,00	310.022014.134/2	07.331.273.037,00	2, 2, 131,033,000	10

"MENGETAHUI"
ALAO NAS PENDAPATAN DAERAH
KASHPATEN MUSI RAWAS A

MASUBDIN PERENCANAAN PEMBUKUAN DAN PENGAWAS, ILL DINAS PENDAPATAN DAERA; KAB. MUSI RAWAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAVVAS * DINAS PENDAPATAN DAERAH JI. Yos Sudarso Taba Pingin Telp. 451321

REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DALAM KAB. MUSIRAWAS TAHUN ANGGARAN 2005 BULAN: DESEMBER 2005

NO.		JENIS PENERIMAAN	TARGET		REALISASI	
NO.		JENIS PENERIMAAN	TARGET	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1		2	, 3	4	5	6,
	I. 1.01.0500.1.1. PA.	JAK DAERAH				
1	1.01.0500.1.01.01	RESTORAN	35 000 000,00	32 487 500,00	3 415 000 00	35 902 500,00
2	1 01.0500.1.01 02	HIBURAN	1 500 000,00		500 000,00	2 280 000,00
3	1.01.0500.1.01 03	REKLAME	15 000 000 00	1002-1025-1020-200-200-200-	1.152.400,00	15 002 410,00
4	1.01.0500.1.01.04.	PENERANGAN JALAN	650 000 000 00	Inches of the contract of the	71 022 587,00	843.504 251,00
5	1.01.0500 1.01 05	PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAM FERHALI CALIAN GOLONGAN C	800 000 000,00		435 797 206,00	,
	1.01.0500 1.01 06.	PARKIR	6.300.000,00	7 335 000,00	115 000,00	7.450 000,0
		JUMLAH I	1.507.800.000,00	1.335.052.735,00	512.002.193,00	1.847.054.928,0
	II. 1,01.0500.1.2. RE	TRIBUSI DAFRAH				
1	PELAYANAN KESE					
	1.01.0500.1.02 01 01		2 427 900 000 00	1,698,134,858 00	140 657 962.00	1,838,792,820.0
	I was a second of the second o	DINAS KESEHATAN	300.000 000,00			
2	1.01 0500.1 02 02	PELAYANAN PERSAMPAHAN / KE BERSHAN	4 500 000,00			
3	PENGGANTIAN BIA		4 300 000,00	., 380 000,00	120 000,00	4.500 000,0
	1.01.0500.1.02 03	PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP	16.000.000,00	17.565 500,00	150 000,00	17.715.500,0
	1.01.0500.1.02.04	PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTE CATATAN SIPIL	80,000,000,00	65.545 500,00	1 925 000,00	67.470 500,0
	1.01.0500.1.02.05	PELAYANAN PARKIR	8.700 000,00	8.750 000,00	300.000,00	9 050 000,0
	1.01.0500.1.02.06	PELAYANAN PASAR	159,990,000,00	91.829 315,00	12.390.000,00	104.219 315,
	1.01.0500.1.02.07	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (KIR.)	144 604 000 00	181.001 220.00	13.957.660,00	
	1.01.0500.1.02.08	JASA USAHA PEMAKAIAN KEKANAAN CIAL RAH	17 000 000,00			
	1.01.0500.1.02.09	JASA USAHA PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN	736.000.000.00		100000	
	1.01.0500.1.02.10	JASA USAHA TERMINAL	684 846 000,00			DUITE HUMBER TO THE STATE OF A
)	1.01.0500 1.02 11	PELABUHAN KAPAI.	9 878 000,00		6 800 000,00	The second secon
	1.01.0500.1.02.12	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	275 000 000,00	The second secon	55 645 823,00	
	1.01.0500.1.02.13	IZIN GANGGUAN	65 000 000,00		26 550 000,00	
	1.01.0500.1.02.14	IZIN TRAYEK	37 720 000,00		3 085 000,00	
ı	1.01.0500.1.02.15	IZIN PERUNTUKAN PENGGUNA TAHAH	0,00			
5	1.01.0500.1.02.16	IZIN TEMPAT USAHA	35,000,000,00			
	1.01.0500.1.02.17	UANG LEGES	200 000 000,00			
	1 01.0500 1 2.08.04	IZIN TEMPAT PENYIMPANAN BARAILA	10 000 000,00			Galery Design
		JUMLAH II	5.212.138.000.00	4.098.590.205,00	22.20	
	III. 1.01.0500.1.3. HA	ASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH				
1	1.01.0500.1.03.01	BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH	1 384 863 000,00	1 429 737 909.00	436 518 070,00	1 866 255 979.0
		JUMLAH III	1.384.863.000,00	1.429.737.909,00		1.866.255.979,0
	IV. 1.01.0500.1.4. LA	NN-LAIN PENDAPATAN				
	1.01.0500.1.04.01.	HASIL PENJUALAN MILIK DAERAH	101 666,000,00	185 033 200,00	56 050 100,00	441 083 300 0
	1.01.0500.1.04.02.	PENERIMAAN JASA GIRO	3.512 000 000,00	1 998 633 412,00	224 919 524,00	2 223 552 936.0
3	1.01.0500.1.04.07.01	DINAS PERIKANAN DAN PETERMAKAN	30 000 000,00	4 755 000.00	6 215 000,00	10 970 000,0
1	1 01.0500.1.04.07.02	2 DINAS KEHUTANAN	625 000 000,00	406 005 400,00	231 274 200,00	637 279 600,0
5	1.01.0500.1.04.07.03	PENERIMAAN LAIN-LAIN	0,00			
		JUMLAH IV	4.268.666.000,00	5.142.297.218,00	1,914,473,441,00	7.056.680,659,0
		JUMLAH I S/D IV (PAD)	12,373,467,000,00	12.005.588.067,00	3.296.486.997,00	15.302.075.064,0

	TARGET.	1	REALISASI		0.0
JENIS PENERIMAAN	+ TARGET .	S/D RULAN (ALU.	SULAN IN	S/D RULANTIN	TASE
2	3	4		3	
01.0500, 1.1.01, BAGI HASIL PAJAK		1	1		
050/2 01 01 OF PRESENTOR PEDESAM	611 682 517 00	230 915 0 900	700 H S 0,00	200000000	1.
10500.2 01 01.01 PBB SEKTOR PERKOTAATI	224,095,745,0				1
10500.2 CT 01 01 PBB SEKTOR PERKEBUMAN	2 524,540 269,0			1	1 1
1050) 2010101 PBG SEKTOR PERTAMBANGAN MINAS	30 056 304 845 0	Activities and applications of the second	0 28.681 719 707,00		ALC: NESS
#050) 2 (1 01.01 1/85 SEKTOR PERTAMBANGAN NON V	5 84 354 800 0		C same are a	200000000000000000000000000000000000000	
KOSI) 2 1 1 1 101 PBE SSEKTON PERHUTAMAN	609 968 050 6		25:146:354,6	55.7 (5.1.5) 1	
# 0500 2 (1 01.01 TUNGGAKAN PBB TAHUN SEBELUMIK >	98 082 070 0	00 53 670 Se.8,75	0,0:	g (3 polices)	
#.0500.2 (1.01.01 PENERIMAAN PBB DARK PEMERIMTAK P PEMERINTAH DATH SUM-SEL				3 483 407 770,0	297,11
N.05-0.2 (1.01.02 BEA PERCLEHAN HAK ATAS TANAH CH BANGUNAN / BPHTB	1 979 562 604 0	00 2 184 379 106,07	720 - 53 866,00	3 965 012 972.9	
H.05-0.2 1 01.03 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	2 362,477 040.0				
JUMI, AH V	43.025.869.000,0	JO 45.756.384.183,0·	33.218.912.766,00	75,975,295,949,0	185,38
(1.01 0500					1
M.05/0.2 F.C2.01 RIBAN HASIL HUTAN / PROVISI SUMBET HUTAN					
01.05 0.2 J1.02.02 TURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN	1	0.00			
01.05(0.2.)1.02.03. IJRAN TETAP/LANDRENT	100,000,000,000,000,000,000,000,000,000				500 1000
01.05/0.2 11.02.04 JURAN LIKSPIJORASI DAN EKPLOITAS E 01.05/0.2 11.02.05 JURAN KLASA USAHA PERTAMBANGA:					
01 05/0.2 31.02.05 PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIAMBANGA	1	00 0,0	0.00		
01.0500.2 01.02.07 PURGUTAN HASIL PERIKANAN		0.0	1 '		7.4.0.500
01 0500 2 01.02.08 MIFTYAK EL MI	25 050,000,000,0		0,00		was a second
01,05,00,2 01,02 09 GAS ALAW	24,000,000,000,000,0		0 12,416 400 131,0	CALL COLORS COLORS SA	
01.0500.2 01.02.10 PENERIMAAN HAK ATAS TANAH NEG-	I was the second second to the second	00 0,0			
MIOSPO 2 01 02.11 SUMBER DAYA ALAM PERIRAMAN	957 447 000,0	00 241 688 091,0			0.00
IV HAJMUL	53.077.447,000,0	00 65 663 568 093,0	00 31.653 217 712.0	20 93 346 V35 525 ··	105,22
I. 1.01.05 (C.2.2. DANA ALOKASI UMU")			1		
01.0000 2 (2.01 DANA ALOPAS) UMUM	201,781,000,000/	00 20178 000 000 0	6 65	00 50. Jan 0 20 000	11.700
JUNCAH VII	201:781.000.000,0	00 201.781.000 000.00	0,0	00 201781 000 000 0	105.0.
II. 1.01.0100.2.3. DANA A .CKASI KHUSUS					1
01.0500.2 (3.01. REBOIS ASI	25,690 (10,0	00 25 690 696,6	0,0	25,000,000	0 (01)
01.0000.2 03.02. NON REBOISAS.	0,0	00 0,0	0,00	(g)	200
IIIV HA, MUL	25,690,000,0	25,690,000,0			
1.0).(5) (.3.1. BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SYA	202 20	1			1
1.0000.01.01.01 PENERIMAAN DARI PEMERINTAH	9.553,200,000,0	to the same of the		1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
1.0000.01.01.02 PENERIMAAN DARI PROVINSI	8.425.000 000,0				
JUMLAH IX	17.978 200.000,0	00 20.359.130.708.0	3.230,051,988,00	23,589,182,696,0	00 131.21
1.01.05(0 3.2. SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU					
1.0500.1 12.01. SISA LEPIH ANGGARAN TAHUN LALU	31.195.519.959,0				
JUMLAH X	31.195.519.959,0	00 31,195,519,959,0	0,0	00 31,195,519,959,0	100,00
1E KA 'ITULASI					
L PALLS DAERAH	1,507,800,000,0				
PET R BUSI DAERAH BAGMN LABA PERUSAHAAN DAEPAH	5.212,138,000,0				
I. POS I AIN-LAIN PENDAPATAN	1.384 863 000.0 4.268.666 000.0				and the same States
I. BAGI HASIL PAJAK	43.025.869 000	00 46.756.334 183,00	0 33.218 912 760,00	79,975,295,919,69	
L BACTHASIL BUKAN PAJAK	53.077.447.000,0	,00 56,563,568,093,00	0 31,653,217,712,00	98,316,785,805,0	20 185,23
1 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 11 DANA ALOKASI KEUSUS	201.781.000.000,		1	201,781,000,000,0	16 E. M. CONTAGO CO.
C BACIAN LAIN PENERIMAAN YANG SYAH	25 690 000, 17 978 200 000,		NOTE OF THE PARTY	25 690 000,0 0 23,589 152 695,0	
LISIS/ LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	21,195,519,959			31.195 519 959 0	
UMLAH	359.457.192.959,	,00 378.757.746.017,0	0 71.427.804.456,0/	0 450.185.550.473,0	00 125,21
MENGETAHUI,		LUBUK LINGG	GAU, 23 JANUĀR	11 2006	

KABURATEN MUSI RAWAS 6.

C'NA'S ENDAP TAN DARRAH

MUHI MAD. S.IP

KASUBDIN PERENCAMAAN PEMBUKUAN DAN PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAR KAB. MUSI RAWAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAY/A; DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. Yos Sudarso Taba Pingin Telp. 451321

REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DALAM KAB. MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2006 BULAN: DESEMBER 2006

KODE	JENIS PENERIMAAN	TERGET		REALISASI		% TASE
REKENING			S/D BULAN LALU	BULAN INI	SO BULAN INI	
2	3	4	5	6		8
	I. PAJAK DAERAH					
00.1.01.0200.0	Restoran'	52,500,000	34,773,000	17,727,000	52.500.000	100.0
00.1.01.0300.0	Hiburan	7.000.000	5,505,000	1,495,000	7.000.000	100.0
600.1.01.0400.0	Reklame	18,000,000	14,745,520	3,452,220	18,197,740	101.
500.1.01.0500.0	Penerangan Jalan					
		1,100,000,000	2,498,778,983	161,198,808	2,659,977,791	241.
500,1.01.0600.0	Pengolahan Bahan Galian Gol. C	1,126,254,000	969,081,970	749,302,198	1,718,384,168	152.
500.1.01.0700.0	Parkir	8,000,000	6,675,000	1,350,000	8,025,000	100.
500.1.01.0800.0	Sarang Burung Walet	6,000,000	6,000,000		6,000,000	100.
	JUMLAH I	2,317,754,000	3,535,559,473	934,525,226	4,470,084.699	192.
	II. RETRIBUSI DAERAH					
500.1.02.0100.0	Pelayanan Kesehatian					
500.1.02.0101.0	RSUD	2,428,359,000	2,149,456,828	175,293,300	2,324,750,128	96
500.1.02.0102.0	Dinas Kesehatan	323,791,000	331,565,100	33,108,000	384,673.100	112.
500.1.02.0200.0	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6,000,000	4,320,000	1,680,000	6,000,000	100
500.1.02.0300.0	Retribusi Penggantian By, Cetak KTP/KK/	150,000,000	137,743,000		137,743,000	91.
	Lega Lisir dan SKD Kependudukan lainnya.					
500.1.02.0400.0	Retribusi Penggantian By, Celak Akta Capil	155,000,000	148,315,000	7,075,000	155,390,000	160
500.1.02.0500.0	Retribusi Pelayanan Parkir	10,000,000	9,400,000	1,000,000	10,400,000	104.
500.1.02.0600.0	Retribusi Pelayanan Pasar	623,400,000	212,552,060	42,430,560	254,982,620	40.
500,1.02.0700.0	Retribusi Pengi, Kendaraan Bermotor (KIR)	200,000,000	187,339,920	14,356,160	201,696,080	100.
500.1.02.0800.0	Retb. Jasa Ush.Pemkn.Kekayaan Daereh					
500,1.02,0801.0	Sewa alat-alat berat	25,000,000	25.573.200		25.573.200	102
500.1.02.0802.0	Izin Tempat Penyimpanan Barang	15.000.000	4.000.000	50.000	4.050.000	27
500,1.02.0900.0	Retribusi Jasa Usaha Par, Grosir dan	1,100,000,000	602,160,330	351,226,825	953,387,155	86.
	atau Pertokoan	1,100,000,000	002,100,330	331,220,023	955,567,155	00.
500,1,02,1000.0	Retribusi Jasa Usaha Terminal	1,000,000,000	223,743,000	23,464,250	247.207.250	24.
500.1.02.1100.0	Retribusi Pelabuhan Kapal	10,300,000	3,230,000	6,700,000	9,930,000	96
500.1.02.1200.0	Retribusi izin Mendirikan Bangunan	350,000,000	199,224,681	9,881,880	209,106,561	59
500,1,02,1300,0	Retribusi izin Gangguan	100,000,000	85,852,000	12,250,000	98,102,000	98.
500,1.02,1400.0	Retribusi Izin Trayak	45,000,000	56,554,900	1,300,000	57,354,900	128
500.1.02.1500.0	Retribusi Rumah Potong Hewan	2,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	15
500,1,02,1600.0	Retribusi Izin Tempat Usaha	70,000,000	47,800,000	11,250,000	59,050,000	84
500.1.02.1700.0	Retribusi Uang Leges	175,000,000	429,324,014	18,662,082	447,086,096	255
500,1,02,1800,0	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	26,000,000	15,050,000	800,000	15,850,000	60
500.1.02.1900.0	Retribusi Izin Usaha Industri	6,000,000	2,050,000		2,050,000	34
	JUMLAH II	6,818,850,000	4,876,754,033	710,528,057	5,587,282,090	81 9
		0,010,830,000	4,070,7,4,033	710,320,037	3,367,262,080	01:
	III. Hasii Perusahaaan Milik Daorah					
00.1.03.0100.0	Bagi hasii Lembaga Keuangan Bank (BPD.SS)	3,912,000,000	588,965,968	1,718,955,260	2,307,951,228	59.0
	JUMLAH III	3,912,000,000	588,995,968	1,718,955 260	2,307,951,228	59.0

2	3	4	5	6	7	8
1.01.0500.2.03.0000.0	VTIL DANA ALOKASI KHUSUS					
1.01.0500.2.03.0200.0	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	16,020,000,000	5,736,000.000	10,284,000,000	15,020,000,000	100.0
	JUMLAH VIII	16,020,000,000	5,736,000,000	10,284,000,000	16,020,000,000	100.0
1.01.0300.2.04.0000.0	DL LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH					
1.01.0500.3.01.0000.0 1.01.0500.3.01.0200.0	Dana Penyimbangan dari Pemerintah Pusat Penerimaan dari Pemerintah Propinsi	11,309,357,000	5,814,680 10,671,070,190	4,172,674,930	5,814,680 14,813,745,12G	130
	JUMLAH IX	11,399,357,000	10,676,884,870	4,172,674,930	14,849,559,800	130.2
1.01.0500.3.02.01	X. SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU					
1.01.0500.3.02.01	SISA LEBIH ANGGARAN ANGGARAN TAHUN LALU	63,984,246,572	63,984,246,572	-	63,984,246,572	100.
	JUMLAH X	63,984,246,572	63,984,246,572		63,984,248,572	100
	REKAPITULASI					
	I. PAJAK DAERAH	2,317,754,000	3,535,559,473	934,525,226	4,470,084,699	192
	II. RETRIBUSI DAERAH	6,818,850,000	4,876,754,033	710,528,057	5,587,282,090	81.
	III. BAGIAN LABA PERUSAHAAN	3,912,000,000	588,995,968	1,718,955,260	2,307,951,228	59
	N. POS LAIN-LAIN PENDAPATAN	y,612,000,000	15,749,936,955	3,244,320,861	18,994,257,816	197
	V. BAGI HASIL PAJAK	71,139,379,800	71,303,365,803	32,058,923,859	103,362,289,662	145
	M. BAGI HASIL BUKAN PAJAK	74,100,000,000	85,472,192,099	26,867,196,084	112,339,388,183	151
	MI. DANA ALOKASI UMUM (DAU)	358,997,000,000	358,997,000,000		358 997,000,000	100
	MII.DANA ALOKASI KHUSUS IX. BAGI HASIL PAJAK & BANTUAN	16,020,000,000	5,736,000,000	10,284,000,000	16,020,000,000	100
	KEUANGAN DARI PROPINSI	11,399,357,000	10.676.824.670	4 172 674 020	14 040 540 00	400
	X. SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	63,984,246,572	63,984,246,572	4,172,674,930	14,849,559,80C 63,984,248,572	130 100
	JUMLAH	618,300,587,372	620,920,935,773	79.991,124,277	700,912,060,050	113.

" MENGETAHUI "
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAIVAS

H. ISBANDI ARSYAD, SH. M.S. Pembina Utama Muda NIP. 440017397

LUBUK LINGGAU, 31 DESEMBER 2006

KASUBDIN PERENCANAAN PEMBUKUAN DAN PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB.MURA

SYAHRUNSYAH, SE NIP 130399141

Healtest Th 2008

REALISAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN DAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DALAM
KAB. MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2007

CULAN: DESEMBER 2007

1	REKENING	JENIS PENERIMAAN	1ARGE 1 -	SO DULAN LALU	BULAH INI 6	S/O BULAN IN	% TASE
1		I. PAJAK DAERAH					
1		Pnjak Restoran	\$0,000,000	34,784,500	15,275,500	50,060,000	100.1
	4.1.1.02.01	Restoran Rumah Mailan	31,045,000	14,357,000	14,600,000	28,957,000	93.2
1		Warung Makan	18,955,000	20,427,500	675,500	21,103,000	111.3
2	4 1.1.03	Pajek Hiburan Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana	3,000,000	2,040,000	3,000,000	5,040,000 2,600,000	100.8
	4.1.1.03.10	Permainan Bilyard	1,000,000				
	4.1.1.03.19	Permainan Ketar.gkasan Pertandingan Olah Rega	1,000,000	1,440,000	1,000,000	1,440,000 1,000,000	144.
3		Pajak Reklame	25,000,000	13,700,410	734,800	14,435,240	57.
	4.1.1.04.01	Reklame Papan / Billboard / Megatron Reklame Kain	16,032,500	9,747,920 3,204,520	633,000	10,385,920 3,204,520	64. 99.
	4.1.1.04.03		2,312,500 3,437,500	7:18 000	96,800	748,000 96,800	32.
4		Pojak Penerangan Jalan		240.000		7	
1	4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan /	912,740,000	857,210,006 792,883,820	151,160,935 148,121,865	1,008,370,941 94,1,005,685	103,
		Pajak Penerangan Jalan Non Pt.N	G87,760,000	64,326,186	3,030,070	67,365,258	e
6	4 1.1.05.06		665,750,000	2,086,028,553 939,097,485	796,766,940 596,323,460	2,882,795,503 1,535,420,945	115
	4.1.1.05.07 4.1.1.05.08		1,052,500,000	131,479,118 581,385,755	8,092,201	139,570,319 724,134,455	34 68
	4.1.1.05.09	Tanah Urup	151,500,000	397,226,703	40,300,137	437,095,845	220
	4.1.1.05.10 1.1.1.05.11		\$4,000,000	18,576,469 18,194,028	377,992 8,825,450	18,954,481 27,019,478	17
0	4.1.1.07.01		10,000,000	8,550,000	1,500,000	10,050,000	100
,	-1.1.1.07.01	Sarang Buning Walet JUMLAH I	5,000,000	3,350,000	3,000,000	8,350,000	105
	4.1.2	II. RETRIBUSI DAERAH	7,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,	3,005,003,500	971,430,175	3,977,101,684	24
1	4.1.2.01.01	5 - Administration 1 - 200 - 1 - 200 mag 1 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					
		- RSUD - Dinas Kapahatan	1 160,000,000 412,676,000	2,070,110,210	775,605,052	2.200,410,102	7.4
	4.1.2.01.02	Rotribual Pelayanan Persompah in/Kebersihan	6,000,000	335,002,200 3,480,000	27,673,800 2,030,000	412,676,000 5,010,000	100
2	4.1.2.01.0.1	Retr. Penggeotien Blaya Cetak ETP dan Akte Capil	453,000,000	363,936,000	121,133,000	404,969,000	10;
		- Colok KTP, KK	, we treating	161,877,000	90,050,000	252,535,000	101
		- Akta-akta Capil - Akta Lain-lain	23 (10) (100)	200, 15-0 000 1 000 -300	3,355,000 27 120,000	20,020,000	103
3	4.1.2.01.05 4.1.2.01.00	Retribual Pelayanan Pasar	000 000 mm	9,000,000	1,000,000 45,766,500	10,000,000	100
0	4.1.2.01.11		on objective or o	738 7 15 4 10	0,001,520 22,550,650	216,201,100 760,944,060	101
7	4.1.2.02.01	Retr. Pemakalan Kukayana Daerah (Sewa Alat Lecat)		23,6-0,900	3,359,800	30,010,700	100
9	4.1.2.02.04	Retribusi Jasa Usaha Terminal	1.150,000,000	166,347,320	20,983,630	187,330,950	- 1
10	4.1.2.02.08	Retr. Pelayanan Pelabuhan	10,300,000	1,900,000	n,100,000 9,500,000	10,000,000	100
12	4.1.2.32.14		10,000,000	21, 350,000	2,300,000	24,250,000	0
14	4.1.2.02.10	Retr. Izin Tempat Usaha	90 000 460 16 560,000	51,252,000 2,550,000	4,000,000	55,350,000 3,050,000	- C
15	4.1.2.02.19	Sold and the state of the state	1,300,000,000	1,181,57 -,200	254,863,925	1,436,435,125	110
10	4.1.2.02.15	- Rotr. Kamt	400,000,000	364,362,700	77,548,110	441,910,810 987,500,270	110
		Retr. Sawit - Rotr. Cayu Monis	5.50,000,000	010,692,935 236,600	176,807,315	336,000	-
-		- Retr. Pinang - Retr. Kelaj n		3,389,045	5,000	87,000 3,587,545	
		- Retr. Aren		881,500	60,000	941,500	
		- Retr. Kopi - Retr. Gambir	,	1,731,000	245,000	1,975,000	
	1	- Refr. Tebu		20,000		20,000	
	0.0000000000000000000000000000000000000	- Rotr. Komiri - Rotr. Jahe	2	56,000		56,000	-
17	4.1.2.03.01		000,000,000	150,792,662	3,439,890 4,200,000	160,232,552	5
10	4.1,2.03.04	Rotr. izin Trayak	59 000 000	41,000,000	5.695,000	/3,175,000 41,000,000	
20			1. 10 476 550				
		JUMILAHII	I a na granday	2,002,400,232	112.200		
	4.4	3 III. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN	1				
		DAERAH YANG DIPISAHKAD	1 1 2 194 174	1.191.025.00.	2 6.02 49 1 42	1 678 480,761	١,,
1	11,1010	1 Duyktun *athem puda Duok *amasat					
1.	IF A site Contraster on	JUDIA JMUL		1,126,025,300	2,097,404,458	1 3,570,409,70	

.0		3	-1 -1		6	7	8
	4						
1	4.2.3	VIII. DANA ALOKASI KHUSUS				1	
1	4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Non Rejioisasi	50,007,000,000	15,982 100,000	37,307,900,000	53,297,000,000	100.0
		JUMENTALI	53,297,000,000	15,089,100,000	37,307,900,000	53,297,000,000	100
		1					
	43	IX. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	1				
	4.3.3.01	Dana Dar, Hasil Pajak dari Pemerintah Prop.	17,923.059,000	12,628,088,706	8,042,383,710	20,610,472,416	115.
1	4.3.3.01.01		3 25 1, 222, 770	3,209 797,423	1.261,291,020	4,471,080,443	137.
2	4.3.3.01.03		4,252,766,030	2,126,383,150	2,679,997,700	4,806,380,850	113.
3	4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Ben Balik Nama Kendr, Diatas Asi Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kondr Bermeter	3,100,019 10,100,711,980	1,703,820	1,703,830	3,407,650	100.
5		Bagi Hasil dan Pajak Pengambilan & Pemanta atan	16,116,111,110	7,007,200,200	5,577,505,100	11,030,030,000	100.
		Air Bawah Tariah	243,655,225	208,937,407	121,328,000	330,765,407	135.
7	4.3.3.01.07	Dogl Hosil dari Pajok Pengambilan & Domintaat in Alt Pornukaan			,	:	
		Name Daniel & Object 184				•]	
	4.3.4	Dana Penyagualan & Otonomi Khusus Dana Penyasualan				•	
8	4.3.4.01.01		20,000,000,000	18,000,000,000	4,465,223,800	22,465,223,800	112.
	,	JUMLAHIX	17,923,359,000	30,620,088,706	12,507,607,510	43,135,696,216	113.
	^	OFKADITU ACI					
	411	REKAPITULASI I. PAJAK DAERAH	4,196,000,600	3,005,663,509	971,439,175	3,977,101,684	94.
	4.1.2		0.243.476.000	5,889,462,052	772,464,667	6,661,932,719	72
	4.1.3	III. HASIL PENGELOLAAN LEKAYAAN DAERAH				0,000,002,110	
		YANG DIPISAHKAN	3,910,000,000		2,692,464,459	3,878,489,761	99.
	4.1.4		12,922,525,000	25,964,746,092	6,346,096,843	33,309,793,235	257.
	4.2		99,005,977,000	73,350,647,457	40,929,993,279	118,519,084,724	119.
		M. BAGI HASIL BUKAN PAJAK	\$4,051,759,000		37,381,879,610	102,182,526,441	108.
		VIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	410,612,000,000			410,612,000,000	100.
	7.2.2		93,297,096,000		37,307,900,000	53,297,000,000	100.
	4.3	IX. TAINS AIR PERDAPATAN DAURAH YASE SAMI	57,555,555,000	34,616,703,953	12,507,007,510	43,135,696,216	113.
		HA IMUL	275,174,596,000	641,525,989,570	138,909,844,543	775,573,624,780	106.

" MENGETAHUL"

KEPALA DINAS PENDAPATAN DALIKAH

DINAS PEHDAPATAN DAERAY

HARAIDUSYAHRI, SH. MI BEMBINA UTAMA MUDA

SNIP. 440021758

TURUK LINGGAU, 31 DESEMBER 2007

MASURUM PERENCAHAAN PEMBUKUAN DAN PENGAWASAN DINAS FENDAPATAN DAERAH KAB.MURA

> TULHANAN, S.IP. 514 NIP. 440024567

> > Reafe 24 Th. 2007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAI

Jalan Raya Yos Sudarso Telp. (0733) 451321 Fax. (0733) 451321 LUBUKLINGGAU 31626

Lubuk Linggau, 20 Mei 2008

Kepada

Nomor Sifat : 302/I/DPPKAD/2008

Lampiran

٠.

Hal

: Penting

: Surat Keterangan

Selesai Penelitian

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhamadiyah

Palembang

di -

Palembang

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan ini menerangkan :

Nama

: GINTA MAANARI ADIL

MIM

: 222003030

Fakultas

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Mata Kuliah Pokok

: Akuntansi Pemenrintahan

Tempat Penelitian

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

Judul Skripsi

: Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

Dengan ini dijelaskan yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

COLOR DAY ASSET DASSAN

A.n. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Mura Sektetaris.

1:1

SI RAHAIDAR SYAM, SH



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

إنسر والله الرَّكُمار > الرَّكِيثِ

NAMA MAHASISWA

: GINTA MAANARI ADIL PEMBIMBING

NIM

: 22 2003 030

KETUA

BETFI SIRADJUDIN, SE. AK

JURUSAN

AKUNTANSI

ANGGOTA

JUDUL USULAN PENELITIAN : ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PARAF PEMBIMBING NO TGL/BULAN/TAHUN MATERI KONSULTASI KETERANGAN KETUA ANGGOTA 28 APRIL 2008 1

2 mi 2008 3 4 5 2008 6 mai 13 mg/ 2008 7 16 Mei 2008 8 9 10

Tanggal Seminar yang disepakati :

24/08

Di keluarkan : Palembang Pada Tgl

an Dekan

enaJurusan,

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar Yang dibawa oleh Pemakalah

Sunardi, SE. M.Si

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
1	Lail fitti Yanti	22.2003 028	Thirt Si
7	Deny Sapurra	22 2003 161	· Bryl &
3.	Ina. Morgina	22.2003.237	O XM E
4	Maemural	22 2003 166	AL3
5.	Hopri Yanti	22-,2003 229	(lef)
6	Hendrik Irowan	22, 2008.009	104
7.	M. Ruedy	12. 2003. 133	Cooket?
8.	Saktiwan Ilhami	22.2003 184	A
9.	Helmi Edison	22 2003 341	Auz.
(i) ·	Darman	32,2003.100	AVA
11.	M. AIDUL FITRI, SE	22.2003.011	And

CATATAN:

- Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian,



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

A MAHASISW	/A :	GINTA MAANARI ADIL	PEMBIMBING : BETRI SIRADJUDDIN, SE.AK
I/NIM	:	22 2009 030	
JSAN ·	:	AKU NTANSI	
JL SKRIPSI	:	ANALISIS PENERIMAAN LOLAAN KEUANGAN DAN	RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPRNAN, PENGE ASSET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TGL/BL/TH	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PE	MBIMBING	KETERANGAN	
KONSULTASI	WATERI TANG DIBAHAS	KETUA	ANGGOTA	KETERANGAN	
	ĥ.				
17 juni 2008	Jano J 40 3	Y		Walls	
24 'yuni 2008	The 1/2	X		Intra	
28 juni 2008	Me 1 % 4	~		John	
ציטטו שבים צ	In 1 3/4	X		ohul	
8 juli 2008	18W 15/05	X		Juling	
12 juli 2008	Ponlo 1 5/0 T	/		AC.	
15 9011 2008	Shstrak dli	2/		Tuful.	
15 juli 2008	Abstrak all	X		Hec	

ATAN

asiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, lan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang Pada tanggal : 16 106 108

a.n. Dekan

Ketua Jurusan,

Sunardi, SE.Msi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG **FAKULTAS EKONOMI**



JURUSAN

IZIN PENYELENGGARAAN AKREDITASI : No 3450/D/T/2005

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JUSURAN AKUNTANSI (S1)

: No 3449/D/T/2005

No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005

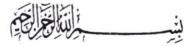
No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

: No 1611/D/T/2005

No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hari / Tanggal

Jum'at, 15 Agustus 2008

Waktu

08.00 WIB

Nama

GINTA MAANARI ADIL

NIM

: 22 2003 030

Jurusan

: Akuntansi

Mata Kuliah Pokok

: Akuntansi Pemerintahan

Judul Skripsi

: ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	Betri Siradjuddin, SE, Ak. M.Si	Pembimbing	27-10-2008	
2.	Dr. Sa'dah Siddiq, SE., M.Si	Ketua Penguji	10 . 11 . 2006	
3.	Aladin, SE., Ak	Anggota Penguji I	28-10-2008	NO
4.	Betri Siradjuddin, SE, Ak. M.Si	Anggota Penguji II	27-10-2008	Che-

Palembang, Oktober 2008

A.n Dekan

AMMADIYA Ketua Jurusan Akuntansi

Sunardi, SE., M.Si.

Islami dan Unggul

SERTIFIKAT

Nomor: 1001/J-10/FE-UMP/VII/2008

بسترون الرحير

Diberikan Kepada

Ginta Maanari Adil

NIM : 222003030 Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al-Qur'an di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan Predikat Cukup Memuaskan

Palembang, 11 Rajab 1429 H

14 Juli 2008 M

Photo 3 x 4

IVAH Arin Dekan Puribantu Dekan IV,

s Antoni

NBM: 78495

BIODATA PENULIS

Nama : Ginta Maanari Adil

NIM : 22 2003 030

Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 07 Juli 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Hero Abadi Blok KK No. 05 Rt. 71 Rw. 18 Kel.

Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar

Palembang

Nomor Telpon / Hp : (0733) 7329027/085268052521

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Cik Adil

2. Ibu : Zultati

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS

2. Ibu : PNS

Alamat Orang Tua : Gg. Satria II Rt.03 Rw.03 No. 26 Kel. Majapahit

Kec. Lubuk Linggau Timur. Lubuk Linggau

Palembang, Juli 2008

